

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- AG. Subarsono, Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Budi Winarno, Kebijakan Publik, Teori dan Proses, Yogyakarta: MedPress, 2007.
- Elizabeth A. Martin dan Jonathan Law, A Dictionary of Law, Sixth Edition. Oxford University Press, New York, 2006.
- I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hal. 87.
- Johnny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Cet. 1 Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Mohammad Zamroni, Kekuasaan Presiden Dalam Mengeluarkan PERPPU (President Authority to Issue PERPPU) Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015.
- Muhlis Madani, Dimensi Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik, Yogyakarta: Grha Ilmu.2011.
- Nomensen Sinamo, Ilmu Perundang-Undangan, (Jakarta: Jalan Permata Aksara, 2016), hal. 85.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2016

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013

Said Zainal Abidin, Kebijakan Publik, Jakarta: Yayasan Pancur Siwah, 2002.

Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah. Penyunting Khudzaifah Dimiyati, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2002.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet III, Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 2007

Peraturan Perundang-undangan

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Wrus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33 /PMK.010/2020 Tentang Tata Cara Pemberian Pinjaman Dari Pemerintah Kepada Lembaga Penjamin Simpanan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38 /PMK.02 /2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan /Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan /Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 /PMK.02 /2020 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43 /PMK.O5/2020 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-III/2005

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 138/PUU-VII/2009

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 37/PUU-XVIII/2020

Tesis & Jurnal

Anggono, B. D., & Firdaus, F. R., Penanganan Pandemi Covid-19 Oleh Pemerintah Ditinjau Dari Produk Hukum Yang Dibentuk, *Jurnal Universitas Trunojoyo Madura* 2021, hal. 36.

Arsil, F., Mengagas Pembatasan Pembentukan dan Materi Muatan PERPPU: Studi Perbandingan Pengaturan dan Penggunaan PERPPU di Negara-Negara Presidensial, *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48 No. 1 (2018): 1-21 ISSN: 0125-9687 (Cetak) E-ISSN: 2503-1465 (Online) Einstein, Helmi, & Ramzy, Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Perspektif Ilmu Perundang-Undangan, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. Vol. 7. No. 7. 2020.

Huda, Sulastri, Najmudin dan Astarudin, Perppu No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 menurut Tinjauan Hukum Tata Negara Darurat, Tesis Program Pascasarjana Universitas UIN Sunan Gunung Djati, 2020.

Juliani, H., Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 3 Issue 2, June 2020, ISSN. 2621-2781 Online, hal. 340.

- Mustakim, Asgar, M. A., & Masidin, The Statutory Arrangement of Article 27 Perppu No. 1 year 2020 (Viewed from Presidential Authority, Immunity Rights and Establishment of Legal Regulations), *Journal research of UNAS*, 2020, hal. 6.
- Nurhalimah, S., Menyoal Kegentingan dan Pasal Impunitas dalam Perppu Corona, *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, No. 1 (2020), hal. 35.
- Ranisya, S. N., & Dwiprigitaningtias, I, Kebijakan Presiden Dalam Menangani Perekonomian Indonesia Saat Pandemi Covid 19 dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020, *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 2 No.1 Tahun 2020, hal. 6.
- Riri Nazriyah, Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, *Jurnal Hukum*, Vol 17 Juli 2010, No 3, hal.387.
- Sugiantari, A. A. W., Kewenangan Presiden Dalam Membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, *Jurnal Mataram GaneÇ Swara Edisi Khusus Vol. 3 No.3 Desember 2009*.

Sumber Online

Website <https://setkab.go.id>

Nuranisa Hamdan, “Sri Mulyani Ungkap Alasan Jokowi Teken Perppu Corona”, ditelusur melalui <https://www.tagar.id/sri-mulyani-ungkap-alasan-jokowi-teken-perppu-corona> tanggal 12 April 2020.